Jurnal Ilmu Sosial **Mamangan**

**Kontestasi Ruang:
Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis**
Prof. Dr. Afrizal, MA.

**Politik Ekologi :
Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran**
Dr. Zainal Arifin, M. Si.

**Fiqh Lingkungan;
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan**
Abrar, M. Ag.

**Bertani di Dua Kota Asia;
Menarik Pelajaran Dari Jakarta Dan Manila**
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si.

**Puar Cama, Hutan Untuk Anak Cucu;
Konsep Sustainability Forest Lokal di Mbeliling, Manggarai Barat**
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Perjuangan Hak Ekologis
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangnan**

Nomor I, Volume 1
Tahun 2012

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Adiyalmon, S. Ag., M. Pd.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Rinel Fitlayeni, S. Sos., MA.
Surya Prahara, SH.

ISSN: 2301-8496

viii + 65 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang
Jl. Gunung Pangilun, Padang
Email: redaksimamangan@yahoo.com

Penerbit :

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

Contac person :

Firdaus (Hp. 085263881221. Email : daus_gila@yahoo.com)

Pengantar Redaksi

Beberapa dekade belakangan, isu lingkungan terus berkembang dan menjadi topik utama di berbagai diskusi ilmiah dan mimbar publik. Diskursus tentang lingkungan kemudian semakin meluas pada berbagai dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah teori klasik yang ditulis oleh Steward mencatat bahwa pada berbagai suku bangsa berburu – meramu (*hunting – gatering*), variasi komposisi jumlah anggota suatu kelompok, sangat ditentukan oleh sumber alam yang ada di sekitarnya dan siklusnya; ada yang besar jumlah anggotanya dan ada pula yang kecil (Poerwanto, 2005:63). Atas dasar ini kemudian isu lingkungan terus berkembang luas mencakup berbagai dimensi.

Mengikuti berbagai perkembangan isu lingkungan dengan dimensi yang sangat luas itu, kami memiliki kesadaran bahwa masalah lingkungan tidak bisa dilihat dan dimaknai secara parsial dalam dimensi yang berorientasi fisik, akan tetapi jauh lebih penting melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial yang luas. Dimensi sosial itu mencakup berbagai aspek, baik yang berhubungan langsung dengan lingkungan fisik maupun tidak. Atas dasar itulah, Jurnal MAMANGAN edisi perdana yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar yang kini ada di tangan pembaca memilih untuk fokus pada isu lingkungan dengan mencoba melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial dari berbagai perspektif.

Secara keseluruhan, tulisan pada edisi perdana ini membahas isu lingkungan dari berbagai pendekatan dan praktek di Indonesia dan Asia. Tulisan pada edisi ini terdiri dari 6 (enam) buah tulisan yang bersumber dari penelitian lapangan dan artikel teoritik yang disumbangkan oleh para akademisi dan peneliti yang sudah berkecimpung lama dalam bidangnya.

Tulisan pertama ditulis oleh Afrizal, yang berbicara tentang kontestasi ruang oleh berbagai pihak pada masyarakat modern yang didominasi oleh keperluan untuk uang dan konservasi. Afrizal menekankan tulisannya pada aspek kontestasi ruang dan keadilan ekologis dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan perspektif keadilan ekologis. Argumen pokok artikelnya disandarkan pada asumsi bahwa ruang merupakan habitat suatu masyarakat hukum adat Indonesia. Dengan asumsi tersebut, afrizal berargumen bahwa penggunaan ruang dalam habitat masyarakat hukum

adat dengan cara mengibiri eksistensi mereka adalah suatu ketidakadilan ekologis. Oleh sebab itu resistensi serta perlawanan warga masyarakat hukum adat adalah resistensi dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekologis.

Tulisan kedua ditulis oleh Zainal Arifin tentang politik ekologis. Tulisan Arifin mendiskusikan tentang perkembangan wacana ramah lingkungan sebagai salah satu cara dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, serta dampaknya bagi keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut Arifin tidak semua aktivitas, program dan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, NGO maupun melalui perorangan mampu membawa dampak yang berarti dalam mengatasi persoalan lingkungan. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa aktivitas, program, dan kebijakan tersebut hanyalah wacana yang dikembangkan demi kepentingan tertentu.

Tulisan ketiga ditulis oleh Abrar yang mengusung isu rekonstruksi pemahaman yang berwawasan antroposentris terhadap alam dengan pemahaman yang teosentris dengan meletakkan segala sesuatu sebagai bagian integral dari moralitas agama, sehingga alam dan ekosistemnya berproses secara seimbang dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Perspektif ini menurutnya juga mengacu pada kepentingan manusia yang dalam Islam disebut *al-Maslahah (human welfare)*, akan tetapi kepentingan yang didasarkan pada moralitas agama bukan antroposentris.

Tulisan keempat ditulis oleh Semiarto A. Poerwanto yang mengulas tentang aktifitas pertanian di dua kota, kota Manila dan kota Jakarta. Di Jakarta, pertanian kota lebih merupakan bagian dari adaptasi kaum migran, baik yang baru datang dari desa maupun yang telah dua-tiga generasi berpindah. Di Manila pertanian kota merupakan bagian dari inisiatif politik yang terkait dengan strategi untuk mengambil hati masyarakat miskin kota. Pemerintah pusat dan daerah mengajukan program pertanian sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan gizi keluarga.

Tulisan kelima ditulis oleh Firdaus tentang kearifan lokal masyarakat Manggarai Barat dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Menurut Firdaus, masyarakat Manggarai Barat memiliki *Puar Cama* sebagai milik bersama dengan sistem *tuak*. *Puar Cama* dengan sistem *tuak* ini menurutnya merupakan kekuatan lokal dalam menjaga kalastarian lingkungan. Namun, di sisi lain masyarakat adat harus dihadapkan dengan hukum positif negara.

Tulisan keenam ditulis oleh Dian K. Anggreta tentang konflik lingkungan antar komunitas petani Kelurahan Kampung Jua Nan XX dengan PT. Semen Padang. Dalam tulisannya, Anggreta menguraikan pertentangan antara kedua kelompok dalam bentuk protes, negosiasi dan perundingan. Sumber konflik menurutnya berasal dari kerugian petani yang disebabkan oleh limbah PT. Semen Padang yang sudah dialami masyarakat sejak tahun 1985.

Akhirnya, kepada para penyumbang tulisan, redaksi mengucapkan terima kasih atas sumbangan tulisan, dan kepada pembaca kami ucapkan selamat membaca.

Salam
Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	v
 Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis Afrizal.....	 1
 Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran Zainal Arifin	 11
 Islam Dan Lingkungan Abrar	 17
 Bertani di Dua Kota Asia; Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila Semiarto A. Purwanto	 25
 <i>Puar Cama</i> Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat Firdaus	 39
 Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani Dian Kurnia Anggreta	 51
 Biografi Penulis	 61

BERTANI DI DUA KOTA ASIA; Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila¹

Semiarto A. Purwanto

*(Dosen Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia)*

Abstrak

Kehidupan masyarakat kota seringkali diidentikkan dengan bidang jasa dan industri yang berbasis teknologi tinggi dan keterampilan yang diperoleh secara khusus. Para ilmuwan sosial menengarai bertahannya praktik bertani di kota-kota besar dunia. Di kota negara berkembang, penjelasan mengenai pertanian kota umumnya dikaitkan dengan migrasi dan penyesuaian para migran di kota. Tulisan ini akan melihat bagaimana pertanian kota berkembang di Jakarta dan Manila, dua kota metropolitan di negara berkembang. Kedua kota ini mewakili jenis kota yang bertumbuh karena migrasi dari desa. Baik di Jakarta maupun Manila, keterbatasan lahan menjadi bagian penting dari eksistensi pertanian kota. Di Jakarta, pertanian kota lebih merupakan bagian dari adaptasi kaum migran, baik yang baru datang dari desa maupun yang telah dua-tiga generasi berpindah. Mereka mengelola lahan-lahan di terutama di pinggir kota dimana sejumlah lahan tidur ditemukan. Di Manila pertanian kota merupakan bagian dari inisiatif politik yang terkait dengan strategi untuk mengambil hati masyarakat miskin kota. Pemerintah pusat dan daerah mengajukan program pertanian sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan gizi keluarga.

Kata Kunci: *Pertanian kota, Jakarta, Manila, adaptasi, kebijakan kota*

Pendahuluan

Sejarah pertanian kota, menurut Castillo (2003) sudah dimulai sejak kota-kota muncul di dunia, ribuan tahun yang lalu. Ia menegaskan kesalahan hipotesis bahwa setelah kota dilanda

modernisasi dan perkembangan industri, pertanian akan menghilang di kota. Nyatanya tidak demikian. Pada dasawarsa 1960-70an, para peneliti memang seperti mengabaikan isu pertanian kota; mereka lebih memperhatikan aspek modernisasi dan industri di kota. Namun, saat ekonomi terguncang, selalu saja pertanian muncul sebagai penyelamat hajat hidup orang kota seperti yang terjadi di Afrika (Memon & Lee-

¹ Tulisan ini ditulis dari hasil penelitian disertasi S3 penulis dan hasil penelitian yang dibiayai API Japan Fondation. Artikel ini disampaikan dalam Seminar Membangun City Branding Kota Semarang, 9 Agustus 2011

Smith 1993) dan di Indonesia (Purnomosidi 2000, Siregar 2001). Umumnya, pertanian dipandang sebagai sebuah *'hidden livelihood'* pada kota-kota negara berkembang (Twyman & Slater 2005). Dalam tulisan ini saya ingin mengajukan argumen perlunya memasukkan pertanian kota dalam perencanaan tata kota sebagaimana pernah diungkapkan oleh Drescher (2001). Argumen ini bukan hanya untuk kepentingan pengembangan pertanian kota, tetapi juga untuk menampilkan identitas kota. Dengan mengambil kasus yang terjadi di kota metropolitan Jakarta dan Manila, saya berkeyakinan pertanian kota mampu menampilkan kekhasan wajah kota berikut dinamika sosial politik di dalamnya.

Kajian Pertanian Kota

Penelitian mengenai kegiatan pertanian di wilayah kota telah menarik perhatian para ahli seperti McGee (1991) ketika menggambarkan perubahan sistem pemukiman di kota-kota Asia. Ia bicara soal wilayah *desakota* yang merupakan suatu wilayah abu-abu dengan ciri percampuran kegiatan pertanian dan non-pertanian². Di *desakota*, yang terbentuk di beberapa tempat di Asia sebagai hasil dari proses urbanisasi, pertanian kota dapat dijumpai bersisihan dengan moda ekonomi lain seperti industri, perdagangan dan jasa. Sebegitu jauh, cakupan karya McGee dengan *desakotanya* tidak mengungkapkan secara utuh masalah pertanian kota ini, tetapi hanya mengindikasikan kemunculannya belaka.

Belakangan, Mougeot (2005) seorang pemerhati pertanian kota, menyatakan bahwa pertanian kota merupakan sebuah strategi

yang dilakukan oleh penduduk miskin di kota yang biasanya dilakukan berbarengan dengan strategi lainnya. Berbeda dengan McGee yang melihat kemunculan pertanian kota terbatas di *desakota*, Mougeot mengajukan kemungkinan menjumpai pertanian kota di hampir semua wilayah ekonomi (*spatial economic regions*) yang diungkapkan McGee. Bagi Mougeot, pertanian kota merupakan:

'...an industry located within (intra-urban) or on the fringe (peri-urban) of a town, a city or a metropolis, which grows and raises, processes and distributes a diversity of food and non-food products, (re-)using largely human and material resources, products and services found in and around that urban area, and in turn supplying human and material resources, products and services largely to that urban area.' (Mougeot 2005:18).

Istilah pertanian kota (*urban agriculture*) merupakan terminologi yang dipakai negara donor dari Barat dan para pembuat kebijakan kota. Merujuk pada definisi Mougeot, jelas bahwa istilah ini tidak ditujukan pada sebuah frase yang mempunyai makna akademik tetapi praktis. Definisi tersebut juga tidak membedakannya dengan kegiatan pertanian yang lain seperti sawah, kebun atau ladang, tetapi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di kota, bukan di desa³, dataran tinggi, hutan atau pantai.

Di negara maju, pertanian perkotaan dianggap sebagai bagian penting bagi keselarasan hidup manusia. Lanskap pedesaan berikut tatanan organik yang ada di dalamnya berfungsi sebagai bagian dari upaya mengelola lingkungan hidup sekaligus mempercantik kota. Definisi

² McGee mengungkapkan lima wilayah yang berbeda ciri sosial ekonomi dan mobilitas penduduk dan komoditas yang diproduksi. Wilayah-wilayah tersebut adalah kota-kota utama (*major cities*), wilayah pinggiran kota (*peri-urban regions*), *desakota*, wilayah pedesaan berpenduduk padat (*densely populated rural regions*), dan wilayah di luar itu yang berpenduduk jarang (*sparsely populated frontier regions*).

³ Di sisi lain, Castillo (2003:339-340) mengatakan bahwa istilah pertanian kota merupakan sebuah konsep yang oksimoron atau paradoksal. Kaum fungsionalis dan developmentalis seringkali membuat dikotomi desa dan kota yang terikat pada fungsi produksi yang ketat: desa yang agraris dan kota yang industrialis. Kehadiran pertanian di kota dengan demikian menghapus dualisme tersebut.

pertanian kota berikut mewakili pandangan tersebut,

"A complex system encompassing a spectrum of interests, from a traditional core of activities associated with the production, processing, marketing, distribution, and consumption, to a multiplicity of other benefits and services that are less widely acknowledged and documented. These include recreation and leisure; economic vitality and business entrepreneurship, individual health and well-being; community health and well-being; landscape beautification; and environmental restoration and remediation" (Butler & Maronek 2002:halaman?).

Definisi di atas memperlihatkan aspek ekonomi dari pertanian di kota dan unsur-unsur rekreatif, pendidikan, kenyamanan, keindahan kota dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain definisi yang luas cakupan dan operasionalisasinya, konsep pertanian kota juga seringkali tumpang-tukar antara pertanian kota (*urban agriculture*) dengan kegiatan bertani di kota (*urban farming*). Dalam hal ini, saya tidak akan terlalu mempersoalkan kedua konsep tersebut dan akan menggunakan keduanya secara berbeda dalam konteks-konteks yang sangat khusus. Saya sependapat dengan Drechsel dkk (1999) yang tidak terlalu menekankan pilihan konsep *farming* atau *agriculture*nya, tetapi lebih melihat pada cara yang dilakukan oleh penduduk kota untuk menghasilkan sendiri makanan mereka atau menjualnya sebagai komoditas. Pada pengertian ini, pertanian kota menjadi strategi atau cara untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai strategi, dalam kaitannya dengan proses pembentukan identitas kota, pertanian kota dapat diarahkan menjadi sebuah gerakan sosial.

Tetapi, mungkinkah bertani di kota? Bukankah pertanian terkait dengan lahan, sementara kota selalu berada dalam kondisi

lahan yang terbatas. Harga tanah yang tinggi dan ketersediaan tanah untuk pertanian yang sangat rendah di kota nyaris menjadikan kegiatan bertani menjadi musykil. Namun ada beberapa hal yang menjadikan bertani niscaya dapat dilakukan di kota, antara lain adanya lahan kosong atau lahan tidur di kota. Para petani dapat menggarap lahan kosong itu menjadi lahan pertanian melalui proses sewa, pendudukan lahan atau mekanisme lain. Di Jakarta, pada saat krisis ekonomi 1997-98, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso⁴ menyarankan warga untuk menggarap lahan tidur berupa lahan kosong bakal proyek perumahan atau industri yang terbengkelai karena masalah keuangan di para investor. Menurut Suradi & Bakti Setiawan (2004) para investor atau pemilik lahan memang tidak mengharap keuntungan finansial dari membiarkan petani menggarap tanah mereka, namun mereka sangat hirau pada status lahan mereka. Dengan status HGB (Hak Guna Bangunan), maka lahan kosong yang terlalu lama akan dikategorikan sebagai tidak produktif yang nantinya menyulitkan pengurusan lisensi untuk perpanjangan masa berlaku HGB. Lahan kosong juga sangat rentan untuk dipermasalahkan kepemilikan maupun peruntukannya; dalam hal ini, kegiatan pertanian yang dilakukan petani kota telah mengubah status lahan kosong menjadi lahan produktif dengan kepemilikan relatif tetap.

Dalam konteks pertanian kota komersial, Drechsel dkk (1999) menjelaskan bahwa pilihan untuk menanam komoditas tertentu sangat

⁴ Periksa pernyataannya, sebagaimana dilansir Harian Kompas Kamis, 6 Agustus 1998. Berita itu memuat kebijakan Gubernur untuk menyiasati kondisi kekurangan pangan di Jakarta dengan antara lain mengizinkan warga kota bertani sayuran secara terbatas di lahan tidur milik Pemda DKI Jakarta sesuai dengan aturan yang berlaku. Kutipan beritanya, a.l.: *"Saya mengerti kesulitan rakyat. Boleh saja menggarap lahan tidur asalkan melalui prosedur yang benar," kata Sutiyoso. Misalnya, pemanfaatan lahan tersebut harus seizin pemerintah setempat. "Yang penting, ketika pemerintah daerah mengambil lahan kembali, penggarapnya harus mengembalikannya," lanjutnya.*

dipengaruhi oleh usia panen suatu tanaman. Semakin cepat panen sehingga jarak menanam dan memanen menjadi singkat, satu jenis tanaman akan cenderung untuk dipilih. Kemudian, pilihan tanaman yang dipengaruhi usia panen ini, oleh Drechsel dikombinasikan dengan variabel ruang geografis sebagaimana model yang pernah dikembangkan oleh Von Thunen di tahun 1828. Pada isu ruang ini, Drechsel saya letakkan berdampingan dengan McGee yang sama-sama memperhitungkan orientasi geografis sebagai faktor determinan dalam model yang mereka kembangkan. Letak geografis akan mempengaruhi jenis tanaman yang dipilih, sehingga tanaman yang lebih mudah busuk akan ditanam di dekat pasar atau pusat kota. Sementara itu, jenis padi-padian, jagung, kentang dan tanaman lain serta ternak dapat ditanam di luar wilayah pusat kota. Untuk membangun modelnya, Drechsel menempatkan variabel ke tiga, yaitu transportasi sebagai hal penting dalam membicarakan pertanian kota. Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh McGee, ketersediaan sistem transportasi di sekitar kota-kota di Asia memang memainkan peranan penting dalam hal pemasaran hasil pertanian.

Guna menggambarkan bagaimana memperoleh dan memperlakukan lahan mereka, saya merujuk pada kategorisasi yang dibuat Drechsel dkk (1999) mengenai para petani kota, yaitu: para peladang berpindah di kota (*the urban shifting cultivators*), para pekebun rumahan (*the household gardeners*), dan para produser di pinggiran kota (*the peri-urban market producers*).

Kategori pertama, jelas mengambil inspirasi dari kaum peladang berpindah di hutan, namun berbeda dalam penyebab mengapa mereka berpindah. Kalau peladang berpindah di hutan, perpindahan dilakukan karena alasan teknologi bertaninya, sementara di kota alasannya adalah karena status kepemilikan lahan. Apabila pemilik lahan meminta kembali lahannya, maka

petani harus meninggalkan lahan tersebut dan mencari lahan baru. Pada kategori ini, petani kota dapat saja berorientasi subsistensi atau komersial dengan pilihan komoditas jatuh pada jenis yang cepat panen, tidak memerlukan pupuk terlalu banyak dan cepat laku di pasar tradisional. Kategori kedua merujuk pada penduduk kota yang memiliki pekarangan di sekitar rumah tinggal mereka. Status lahan dengan demikian sangat jelas dan kuat, sehingga investasi untuk tanaman jangka panjang dapat dilakukan. Pilihan komoditasnya dapat berupa tanaman perkebunan dan buah-buahan, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Memelihara ternak juga menjadi pilihan yang masuk akal pada kategori ini. Kategori ketiga, merupakan varian dari kategori kedua tetapi lokasi mereka berada di pinggiran kota. Dengan status lahan yang mantap, investasi untuk menanam komoditas yang bernilai jual tinggi dapat dilakukan, misalnya tomat, cabe, bawang dan sebagainya. Tentu saja input produksinya relatif tinggi terutama untuk pupuk dan pestisida, oleh karena itu petani di pinggiran kota ini harus mempunyai koneksi dengan pasar modern atau supermarket.

Pertanian Kota di Jakarta

Kalau kita menuruti petunjuk McGee (1991) ketika berbicara mengenai wilayah-wilayah geografi ekonomi masyarakat kota di Asia Tenggara, maka lokasi para petani kota adalah pada wilayah *desakota*. Sementara menurut petunjuk Mougeot (2005), petani kota dapat ditemui di seluruh penjuru kota, tidak peduli di pinggiran atau tengah kota. Di Jakarta, Purnomohadi (2000) dan Siregar (2006) menunjukkan secara jelas lokasi-lokasi mereka di tengah kota Jakarta.

Berbagai kajian di atas memberikan gambaran lokasi para petani kota di Jakarta. Dalam penelitian, saya sungguh sangat terbantu

oleh kajian-kajian di atas. Wilayah Jakarta Timur, di lima kelurahan: Ceger, Bambu Apus, Cipayung, Cibubur dan Pondokraggon, saya amati secara intensif selama kurun waktu 2006-2008 (Purwanto 2010). Di wilayah Kecamatan Cipayung, di pinggiran Jakarta Timur, yang menyediakan areal pertanian yang cukup luas bagi sebuah kota, saya memilih empat lokasi dengan karakteristik komunitas yang berbeda untuk dapat dijadikan pelajaran. Keempatnya adalah kebun sayur di Jl. Mandor Hasan, Ceger; kebun sayur di Jl Budi Murni 3, Bambu Apus; kebun sayur di Jl. Kranggan, Pondokraggon; dan kebun sayur di gerbang perbatasan Depok-Bekasi, Jl. Trans Yogie, Cibubur.

Salah satu fakta yang menonjol dalam hal ini adalah tidak ada satu pun petani kota, yang sebagian besar adalah migran, yang membeli tanah untuk mereka jadikan kebun sayur. Dengan demikian perkara penguasaan tanah atau lahan menjadi isu yang lain dimensinya dengan isu agraria dalam kajian pertanian pada umumnya. Pada umumnya, mereka mengejar lokasi dimana mereka menjumpai lahan atau kavling kosong yang dapat mereka tanami. Jadilah kita bisa temukan mereka bertani di sekitar menara telepon seluler, menggarap ladang sayur di pinggir jalan raya menuju Cikeas, membuka kebun di sekitar tempat pemakaman umum, bahkan saya menjumpai sebuah kebun sayur di belakang sekolah internasional di kawasan tersebut.

Sepanjang pengamatan saya, semua petani kota di wilayah yang saya amati di atas menanam sayur untuk dijual. Tidak ada yang menanam jenis tanaman pangan atau tanaman keras secara komersial. Juga tidak ada yang menanam sayur hanya untuk dikonsumsi sendiri. Kangkung, bayam, kemangi dan sawi merupakan jenis sayur yang paling banyak ditanam. Selain itu mereka juga menanam selada, kenikir, terong, dan sereh.

Pilihan pada jenis sayur tersebut didasarkan pada masa panen yang cepat, rata-rata 20 hari sejak ditabur benihnya, sudah bisa diambil hasilnya. Semakin cepat panen, semakin tinggi pula kemungkinan ditanam petani. Bayam dan kangkung menempati prioritas utama untuk jenis yang ditanam. Bibitnya mudah didapat dan murah, perawatannya mudah dan pasarnya jelas. Kenikir, walaupun bukan tanaman yang umum dijumpai, tetapi dianggap sebagai sebuah komoditas yang berpotensi ekonomi tinggi.

Petani memang harus cerdik mengatur strategi bertani. Mereka perlu memperhitungkan dengan cermat komoditas yang akan ditanam, luas lahan garapan, waktu tanam dan kemungkinan kendala akibat hama atau cuaca. Sangat mungkin petani menanam kebunnya tidak dalam masa yang sama. Oleh karena itu, dari petakan atau garitan ke garitan yang lain, bisa jadi tahapannya berbeda. Misalnya, 10 garitan sedang diolah, sehingga ada pada masa persiapan; 8 garitan yang lain sudah tumbuh dan memasuki masa pemeliharaan tanaman; sementara garitan yang lain sudah bisa dipungut hasilnya. Dengan demikian, berkali-kali saya menjumpai informan saya menyatakan kalau mereka bekerja terus sepanjang hari, tanpa pernah berhenti. Panen pun bisa terus dilakukan sepanjang hari. Dua orang informan saya, Sawin dan Ukas, mempraktekkan pengaturan masa tanam sedemikian rupa sehingga mereka bisa panen setiap hari. Mereka menceritakan strategi agar bisa panen terus: kita harus menanam sesuai dengan umur tanaman dan mengatur garitan mana yang harus ditanami. Kalau masa pengolahan lahan 5 hari, usia tanaman diambil rata-rata 20 hari dan masa panen berlangsung selama 5 hari, maka hitungan matematis agar kita panen terus adalah pada saat kita menanam untuk kali ke 5.

Sawin, dengan modal yang ada padanya, mampu mempekerjakan kuli kontrak untuk menggarap setiap garitan yang dikuasainya.

Skema 1.
Kemungkinan Tanam-Panen Berkelanjutan

Dengan tenaga tambahan ini, ia dapat mengatur hasil panennya secara leluasa. Sampai sekarang, satu setengah tahun setelah saya mengenal Sawin, ia masih mempraktekkan strategi panen terus menerus. Ketika saya konfrontir pengalaman Sawin dengan Ukas, Ukas tidak membantah. Sekalipun demikian, dalam kasus Ukas, ia merasa pengaturan demikian tidak efektif. Lahan yang dikuasanya terbatas. Kalau ia menanam dengan rotasi pendek, misalnya seminggu sekali agar dapat panen terus setiap hari, maka hasilnya hanya sedikit. Dengan 30 garit ia menceritakan pengalamannya menanam seminggu sekali sebanyak masing-masing 3-4 garitan. Hasil yang diperoleh untuk tanaman bayam adalah sekitar 1000 ikat per sekali panen atau perminggu. Harga jualnya, kalau seikat 200 rupiah mencapai 200.000, dipotong ongkos produksi ia mendapat bersih 100-150.000 perminggu. Baginya itu terlalu kecil, bila dibandingkan misalnya membagi seluruh 30 garit yang dimilikinya menjadi dua kali tanam setiap bulan. Dengan perhitungan yang sama ia akan memperoleh 15 garit bayam menghasilkan 5.000 ikat, dijual 200 per ikat, hasilnya sejuta rupiah. Dipotong ongkos produksi, bersih sekitar 750-800.000 rupiah. Jumlah ini akan diulangi untuk tanam kali ke dua bulan yang sama. Dengan demikian, setiap bulan sekitar satu setengah juta rupiah ia bisa kumpulkan.

Mengingat pentingnya faktor luasan lahan garapan, yang dihitung dengan satuan garit; sekitar 1 meter kali 10-15 meter, saya berusaha mencari informasi mengenai penguasaan lahan. Melalui survei pada 43 petani di Pondokraggon, Cipayung dan Bambu Apus saya menghitung bahwa mereka mengelola 1.563 garit, atau rata-rata 36.3 garit/petani. Memang rentang kepemilikan lahan ini cukup lebar, dari terendah 3 garit sampai terbanyak 140 garit. Pemilik lahan pertanian yang sempit adalah para petani yang mengkhususkan diri menjadi pedagang sayur. Mereka tidak memfokuskan kegiatan pada produksi tetapi mendistribusikan hasil produksi petani lain. Bertani hanya menjadi kegiatan pengisi waktu senggang yang hasilnya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual langsung ke konsumen.

Pertanian Kota di Manila

Di Asia, kajian dan pengembangan pertanian kota di Filipina merupakan salah satu yang termaju. Berbagai penelitian, pendampingan dan kebijakan mengenai pertanian kota telah dilakukan di sana. Dalam kajiannya, de Guzman (2005) bahkan telah melakukan telaah atas berbagai hasil penelitian pertanian kota dalam sebuah bibliografi beranotasi. Menurutnya, jauh

sebelum istilah pertanian kota diperkenalkan, praktek pertanian di kota telah lama dikenal dan dilakukan di Filipina. Dari dokumen keluaran dasawarsa 1970-an, de Guzman mengindikasikan kehadiran pertanian kota dengan dibangunnya kebun sayur di lahan kosong 10 hektar di Pasay City. Sayangnya, kegiatan tersebut terhenti oleh pembangunan infrastruktur di lahan tersebut. Selain sejarah pertanian kota, de Guzman mengidentifikasi topik-topik pembicaraan mengenai pertanian kota di Filipina sebagai berikut : penilaian mengenai kemungkinan penerapan pertanian di kota dan pinggiran kota, peternakan, perikanan, aspek keamanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat kota, penghijauan, pertanian kota sebagai mata pencaharian, kebijakan dan perencanaan kota, dan riset dan pengembangan pertanian kota.

Pada tahun 2008-2009, saya berkesempatan melakukan pengamatan di Manila selama satu tahun (Purwanto 2009). Dalam kurun waktu itu saya amati bagaimana pemerintah Kota Manila menawarkan konsep pertanian kota untuk membangun kota melalui berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun kota. Kebijakan untuk mengembangkan pertanian kota tak lepas dari arahan *Republic Act 8435* yang dikenal juga sebagai aturan pokok modernisasi di bidang pertanian dan perikanan atau *Agriculture and Fisheries Modernization Act (AFMA)*. Di bawah pemerintahan Presiden Gloria Macapagal, AFMA terwujud dalam kebijakan presiden yakni *Ginintuang Masaganang Ani (GMA)*⁵ yang menjadi pedoman bagi seluruh program pertanian yang dikelola Departemen Pertanian. Dua tujuan utamanya adalah untuk mendukung keamanan pangan dan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan panen petani.

Pada tahun 2006, Menteri Pertanian Arthur C. Yap melakukan otokritik terhadap

performa lembaganya dengan menyatakan bahwa upaya modernisasi pertanian tanpa mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ibarat hanya menampilkan sukses secara statistik belaka. Untuk itu, ia merumuskan program khusus bernama proyek kebun untuk orang miskin (*Gulayan Para sa Masa*) atau program kebun untuk kesejahteraan keluarga (*Programang Gulayan ng Masa Tungo sa Kanayunang Malusog sa Pag-asa*). Kedua program tersebut diarahkan untuk mensukseskan tiga program lain yang lebih ambisius yaitu rencana agar kaum miskin dapat meningkat gizinya melalui asupan daging ayam (*Manukan Para sa Masa*), melalui asupan daging ikan lele (*Isdaan Para sa Masa*) yang nantinya terwujud melalui terminal pangan di tingkat kampung (*Barangay Food Terminal*).

Di wilayah perkotaan, AFMA dan program *gulayan ng masa* terwujud dalam pengembangan pertanian kota untuk memastikan agar kaum miskin kota dapat mengakses pangan secara murah dan mudah melalui upaya mereka sendiri. Bonusnya adalah kalau mereka mampu menjual hasil panennya. Saat penelitian berlangsung program pertanian kota di Filipina dikenal sebagai proyek *Kabuhayan sa Gulayan at Bulaklakan* or *Gulayan at Bulaklakan* (Proyek untuk promosi kebun tanaman sayur dan bunga atau kebun (pekarangan) dan kebun bunga).

Riwayat formal program pertanian kota sebenarnya juga bisa dilacak dari saat Presiden Joseph Estrada berkuasa. Ibu negara, Loi Ejercito, merintis proyek yang mengkombinasikan kebun sayur untuk penghidupan masyarakat miskin dengan kebun bunga untuk mempercantik kota. Upaya yang dirintis dari tahun 1998 ini semula ditangani Kantor Kepresidenan bidang Keamanan Pangan namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota kemudian membentuk badan khusus. Di Manila, sebuah konsorsium yang terdiri dari badan otoritas pembangunan ibukota (*Metropolitan Manila Development Authority*),

⁵ Sebuah program untuk panen raya berkelanjutan yang dibuat oleh pemerintah Philipina.

Kantor Ibu Negara, Pemerintah Kota di tingkat kelurahan (*barangay*), dan beberapa LSM, bekerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Setelah dua tahun, dilaporkan telah terbentuk 30 kebun sayur dengan total luas 230.000 meter persegi yang telah menguntungkan 2.500 orang miskin di kota (Anenias 2001).

Di masa Gloria Macapagal, Departemen Pertanian menjadi lembaga pelaksana program pertanian kota melalui kantor penanaman dan industri (*Bureau of Plant and Industry*). Sekalipun demikian, di wilayah Manila, kantor tersebut harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Metro Manila. Ketika saya berkunjung ke kantor di tingkat Pemerintah Kota, saya menjumpai biro khusus untuk pengembangan pertanian kota yang dipimpin oleh seorang koordinator program. Menurut koordinatornya, program pertanian kota merupakan bagian dari *Serbisyo Muna*⁶ yang dirancang Presiden Aroyo untuk memenuhi kebutuhan warga miskin.

Saat hendak mengakhiri penelitian, saya menjumpai program baru Presiden Arroyo untuk mengantisipasi krisis ekonomi 2009. Ia mengeluarkan Executive Order No.776 *Rolling Out the Backyard Food Production in the Urban Areas*, semacam Peraturan Pemerintah (PP) untuk meningkatkan produksi pangan di kota melalui pemanfaatan halaman belakang rumah. PP yang diumumkan 16 Januari 2009 itu merupakan sebuah seruan untuk membentuk kebun sayur dan kolam ikan di lahan milik swasta, lahan kosong bahkan kalau diperlukan lahan di sekitar gedung atau kantor pemerintahan.

Sepanjang pengamatan saya, ada empat lembaga yang berperan dalam pengembangan

pertanian kota di Filipina. Masing-masing bekerja dengan target dan sasaran berbeda sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup lembaga. Pertama, inisiatif muncul dari Departemen Pertanian, khususnya di wilayah Manila. Pada mulanya saya berharap pencarian data di Kantor Departemen Pertanian Region IV, yang membawahi wilayah Metro Manila, dapat berjalan dengan lancar. Koordinator Pertanian Kota, Ny. Tita Garcia menyambut saya dengan baik dan berbagi banyak cerita. Namun saat diminta untuk menunjukkan berbagai dokumen yang sering ia sebutkan dalam cerita itu, tidak satupun saya peroleh. Padahal saya sangat berharap mendapat salinan dokumen perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi program. Sayang, semua itu tidak tersedia. Walaupun demikian dia menjelaskan kalau dasar pelaksanaan seluruh program adalah pernyataan Menteri Pertanian.

Beruntung Ny. Garcia mengizinkan saya ikut dalam kegiatan sosialisasi pertanian kota di sekolah-sekolah dasar, sehingga saya dapat melakukan observasi terhadap jalannya program. Region IV bekerjasama dengan *barangay*, sekolah, gereja dan instansi pemerintah lainnya untuk mengembangkan pertanian kota. Sejak tahun 1998 sampai 2009, menurut status terakhir yang saya peroleh, telah terlaksana sejumlah 121 proyek dengan luas area pertanian 947,875 m² dan partisipasi peserta sebanyak 6.373 di wilayah Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal, Pasig, Mandaluyong, Marikina, Valenzuela, San Juan, Paranaque, Pateros, Navotas, Las Pinas, Manila, Muntinlupa, Malabon, Caloocan City, dan Quezon City.

Kantor-kantor instansi pemerintah di Quezon City, seperti kantor Ombudsman dan Kantor Pertanian DA IV berpartisipasi dengan membuat kebun di halamannya. Di kantor ombudsman, sebidang tanah ditata secara artistik menjadi kebun sayur di halaman belakang. Saya lihat kebun yang melingkar dengan garis tengah sekitar 50 meter, yang nampak indah dilihat dari puncak gedung berlantai enam itu. Ada tiga kebun melingkar seperti itu, namun saya hanya

⁶ *Serbisyo muna*, atau pelayanan pertama, adalah program Presiden Arroyo yang dicanangkan tahun 2005 yang dikenal juga sebagai program People's Government Mobile Action (PGMA). Program yang di dalamnya mencakup pengembangan pertanian kota ini diikuti instansi pemerintah daerah, LSM, kelompok keagamaan, swasta dan warga miskin kota. Lembaga lotre nasional, PAGCOR, bertanggungjawab untuk membiayai program secara umum.

menyaksikan dua buah kebun karena satu kebun sudah hancur diterjang banjir. Kantor ombudsman menyewa 10 sampai 20 buruh untuk menyiapkan lahan, dan sekitar 7-10 orang untuk perawatan harian. Untuk menarik perhatian karyawan, pejabat ombudsman membuat kompetisi bagi pegawai rendahan untuk berlomba menanam sayur. Hasil panen terbaik mendapat hadiah atau dibeli dengan harga mahal oleh atasan mereka. Tidak ada hasil panen yang dijual ke pasar, semuanya untuk para pegawai kantor.

Suatu hari saya mengikuti tim Region IV mendiseminasikan program ke Sekolah Dasar-Sekolah Dasar di wilayah Malabon. Tim mensosialisasikan pentingnya pertanian kota, membagi alat-alat pertanian, pupuk dan bibit. Di Sekolah Dasar pertama yang saya kunjungi, SD Negeri Dampalit, sebanyak 80 anak kelas 5 dan 6 ikut sosialisasi, berkerumun di satu kelas. Kondisi yang lebih baik saya saksikan di Sekolah Dasar berikutnya, yang mempunyai aula besar untuk pertemuan sekitar 100 murid. Tiga petugas Region IV berceramah tentang pentingnya sayuran untuk kesehatan, kesehatan dan lingkungan, bagaimana membuat kebun, mengelola sampah dan memproduksi kompos. Walaupun ada sesi tanya jawab yang cukup ramai dengan pertanyaan dan komentar, sebagian besar murid pasif menyimak. Kedua, inisiatif *barangay* atau kelurahan. Saat Loi Estrada mengemukakan ide tentang pertanian kota, Holy Spirit, sebuah *barangay* di *Question City* langsung merespons dengan membangun demplot untuk menarik perhatian warga. Ketua *barangay* menggunakan lahan sengketa yang terlantar dan hanya menjadi TP (Tempat Pembuangan Sampah) warga menjadi kebun contoh. Sang ketua, Felicito Valmocina, yang terkenal dengan julukan 'Super Cap', pada tahun 1998 mengorganisir sebuah kelompok yang dinamai *Samahang ng Munting Manggugulay ng Holy Spirit* dan mulai bertanam di lahan seluas 2.3 ha bersama sekitar 100-an anggota. Dalam perjalanan waktu, kecewa karena mengira akan dibagikan tanah, namun ternyata

hanya diijinkan menggarap lahan, sebagian besar anggota mundur.

Setelah empat tahun berjalan, pimpinan *barangay* mengambil alih pengelolaan dan menyewa seorang insinyur pertanian, David Balilla, untuk mengurus lahan percontohan. Menggunakan cara bertani tradisional yang sudah dimodifikasi, Balilla mengklaim kalau semua jenis tanaman dapat tumbuh di lahannya, "*All plantation under the sun can live here*". Lebih jauh, ia merinci jenis-jenis yang ditanam, yang melebihi jenis sayuran yang disebutkan dalam sebuah lagu anak-anak yang terkenal⁷.

Sekarang, *gulayan at bulaklakan* di *barangay* Holy Spirit menjadi model bagi pertanian kota dan komposting untuk mengolah sampah dari warga *barangay*. Unit komposting mendapat bantuan dari Asian Development Bank; sejumlah lembaga donor juga berpartisipasi, Region IV menyumbang bibit sayur, Biro Perikanan menyediakan teknologi budidaya ikan tilapia (sejenis lele). Saat berkunjung, saya juga memperhatikan sebuah poster besar dengan nama seorang senator di dalamnya. Ia menyumbang pompa air bertenaga matahari dan meminta banner kampanyenya dipasang di demplot itu.

Ketiga, inisiatif individu. Di luar program yang ditawarkan pemerintah, sebenarnya di beberapa wilayah kota Manila, penduduk memang telah bertanam sayur. Di sekitar kampus *University of the Philippines* di Diliman, sebagai contoh, saya temukan area pertanian

⁷ *Bahay kubo*, judul lagu tersebut merupakan lagu standar yang diajarkan di TK dan sangat terkenal sejak 30-an tahun yang lalu. Lagunya bercerita tentang sebuah rumah beratap daun nipah yang walaupun kecil namun di kebunnya terdapat aneka jenis tanaman sayur. Syairnya seperti berikut: "*Bahay kubo, kahit munti, Ang halaman doon, ay sari sari Sinkamas at talong, sigarilyas at mani, Sitaw, bataw, patani//Kundol, patola, upo't kalabasa, At saka mayroon pang labanos, mustasa, Sibuyas, kamatis, bawang at luya, Sa paligid-ligid ay puno ng linga*." Dalam bahasa Indonesia, kurang lebih berarti, "rumah nipah, walaupun kecil di dalam kebunnya terkandung aneka sayuran. Lobak dan terong, kecipir dan kacang, kacang panjang, kacang gondok, dan kacang lima//labu manis, patola, gambas putih dan labu; dan juga ada lobak putih, mustar, bawang merah, tomat, bawang putih dan jahe. Dan disekitarnya tersebar rumput jewawut."

yang cukup luas. Sayang wilayah tersebut diklaim sebagai milik kampus dan sekarang tengah terancam bulldozer yang membangun jalan raya melintasi kebun tersebut. Pada bulan April 2009, beberapa petani masih bertahan di sana. Pak Totoy, seorang petani yang mengaku asli dari daerah itu mengatakan mereka telah bertani jauh sebelum ada kampus *University of the Philipines*. Ia mengelola sawah sekitar 2 ha yang ditanami IR 66 dan musim ini panen 70 -100 karung; satu karung berisi sekitar 40 kg atau total panen sebanyak 2.800 -4000 kg. Berasnya habis dikonsumsi keluarga Totoy yang berjumlah 12 orang.

Kasus petani yang tidak menjual hasil kebunnya juga saya temui di kebun sayur sepanjang sungai Marikina River di daerah sekitar River Banks Mall menuju Pasar Marikina Market yang membentang hingga 2 km. Hampir 100 petani bertanam di pinggir sungai dibawah pengaturan dari Kantor Walikota Marikina. Sebuah kelompok tani dibentuk, terutama untuk membagi kapling lahan pada warga yang berminat. Kelompok tani itu bernama *samahan ng mga mamananim sapatay nailog*. Mang Jose, seorang petani berusia 65 tahun bercerita kalau ia sudah bertahun-tahun menanam sayur di situ. Ia tak pernah menjual hasil panennya, siapa saja yang lewat dan ingin mengambil, ia persilakan. Menurut Mang Jose, bertani baginya adalah terapi pasca stroke yang menimpanya. Ia butuh gerak badan; bertani merupakan sarana yang tepat. Maka, bersama puluhan pensiunan yang lain, ia mengajukan ijin bertani di pinggir Sungai Marikina. Mereka diijinkan, tetapi menurutnya, sampai sekarang belum pernah ada program yang ia terima dari pemerintah. Saya menceritakan program Region IV yang saya tahu, namun ia berkomentar dengan sebuah tanya, "Sudah berapa lama kamu di sini?". Ketika saya jawab sudah tinggal hampir 8 bulan, ia menukas, "*Okay, one day when you stay longer, you will know what the government do for us, the farmers...*".

Keempat, inisiatif universitas. Untuk melengkapi pengamatan saya tentang pertanian kota di Manila, saya menyempatkan pergi ke sebuah kampus di kota Cagayan de Oro di Mindanao yang mengembangkan program pertanian untuk warga miskin perkotaan. Saya mengunjungi *Peri-urban Vegetables Project* (PuVEP), yang berdiri sejak tahun 2002. Proyek itu menjadi laboratorium para ahli pertanian untuk mengembangkan berbagai jenis sayur yang cocok untuk wilayah tertentu. Bekerjasama dengan Kantor Walikota, PuVEP membuat kebun-kebun contoh di *barangay* Bugo, Gusa dan Lapanan dengan dukungan dana dari European Union. Kebun khusus (*allotment garden*) itu merupakan petak-petak sebesar 200-400 meter² yang digunakan warga untuk menanam aneka jenis sayur. Meskipun kebun khusus merupakan hal yang umum di Eropa sejak dua abad lalu, tetapi di Asia masih merupakan hal baru. Oleh karena itu PuVEP mempersiapkan segala sesuatunya dari awal, mulai dari menyiapkan kebun, memilih dan mentransfer teknologi, menyediakan bibit dan pupuk, membentuk kelompok dan organisasi, menyiapkan bantuan finansial, dan memantau pelaksanaannya.

Satu kebun lagi, di *barangay* Macasandig, saya temukan dua kebun khusus yang bernama Christa Holt dan Dietrich sesuai dengan nama orang Jerman yang menyumbangkan dana untuk pengembangan kebun khusus itu. Kebun tertata rapi, berbagai sayur dapat ditemui mulai dari kacang tanah, bayam, kangkung, terong hingga selada. Di Lapanan, ada kebun yang baru didirikan beberapa minggu sebelum saya kunjungi, bernama Hillside. Kebun ini dikelola kelompok wanita yang berpendapat bahwa berkebun merupakan hal positif karena menyalurkan kebiasaan berkumpul ke arah yang produktif. Semula, banyak wanita dewasa menghabiskan waktu berkumpul dan berbincang tanpa arah, sambil berjudi atau sekedar nonton TV. Dengan berkebun mereka memperoleh tambahan pendapatan yang digunakan untuk membeli

makanan tambahan dan membiayai sekolah anak.

Meskipun PuVEP telah mengatur demikian banyak hal, ada saja persoalan yang muncul. Saya saksikan ketika mengunjungi kebun lain di Lapasa; petugas PuVEP yang mengantar saya kebingungan mencari lokasinya. Ternyata lahan kebun percontohannya telah dipagar tembok setinggi dua meter oleh pemilik tanah. Kebun terlantar, petani tidak leluasa masuk. Saya dengar cerita bahwa pemilik tanah bermaksud menjual lahan itu, sementara bagi PuVEP hal ini dianggap mengejutkan karena pemilik tanah terikat kerjasama yang antara lain harus mengalokasikan waktu cukup bagi petani untuk menggarap lahan tersebut.

Penutup

Pada dua kasus di Jakarta dan Manila, saya menghadirkan dua gambaran yang berbeda. Di Jakarta, gambaran mengenai kegiatan bertani saya deskripsikan secara detail. Di Manila detail kegiatan bertani tidak banyak muncul, justru sisi kebijakan yang mendominasi. Gambaran ini saya angkat secara sengaja untuk mendeskripsikan kondisi empiriknya. Dalam pandangan saya, pertanian kota di Jakarta merupakan satu kegiatan spontan dari warga kota, terutama dari kalangan bawah dan atau migran. Mereka bertani untuk kepentingan kehidupan sebagaimana disebutkan oleh para peneliti di muka (Memon & Lee-Smith 1993, Purnomosidi 2000, Siregar 2001, dan Twyman & Slater 2005). Persoalan tanah yang merupakan kendala bagi warga teratasi dengan tersedianya lahan kosong di pinggiran Jakarta. Persoalannya adalah, setiap kali pemilik tanah meminta balik lahannya maka mereka harus berpindah; para petani menjadi *urban shifting cultivators*.

Dari sisi penyelenggaraannya, bertani di Jakarta jelas merupakan inisiatif warga sebagai bagian dari sektor informal. Pemerintah kota, LSM dan kalangan universitas belum

memberikan perhatian yang cukup sehingga kebijakan dan berbagai upaya pengembangan secara sistematis absen pada pembicaraan pertanian kota di Jakarta. Kontras dengan fenomena di Manila yang justru mengedepankan aspek kebijakan dan program sebagai ujung tombak pertanian kota. Kegiatan ini menjadi bagian formal yang secara sengaja dirancang untuk tumbuh. Kepastian lahan diberikan melalui proyek kerjasama Pemerintah Kota dengan pemilik tanah atau instansi pemerintah lain. Kalau lahan ditarik, maka kegiatan berhenti; para petaninya membubarkan diri untuk menekuni kegiatan lain.

Mana lebih baik dari kedua kota tersebut? Kasus yang saya ketengahkan di atas memberi indikasi bahwa kedua-duanya mempunyai sisi buruk. Membicarakan pertanian kota di Jakarta seperti diskusi tentang carut marut aturan formal di kota. Sementara perbincangan pertanian kota di Manila, hanya sebatas mengetengahkan wacana alternatif tanpa dapat ditemukan realitas bertaninya di tingkat masyarakat. Pada saat petani kota di Jakarta dapat menanam sayur dan memanen dengan perhitungan yang masak, para petani di Manila memanen kebijakan pertanian kota yang tidak dikaji dengan masak dampaknya dan hanya dimanfaatkan para politisi sebagai materi kampanye. Dengan kekecualian pada proyek percontohan di Cagayan de Oro, para petani kota di Filipina sayangnya tidak memperoleh banyak manfaat dari kebijakan yang telah ada. Berbeda dengan Manila, walaupun tidak ada kebijakan dan aturan yang langsung merujuk pada pertanian kota, di Jakarta Timur, petani mampu mengelola lahan yang bukan milik mereka dalam luasan yang besar dan waktu yang lama.

Para perencana pembangunan di kota dapat belajar dari kedua kasus di atas bahwa pengembangan pertanian di kota dapat menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat, terutama di tingkat bawah. Namun demikian, kebijakan harus tersebut harus memperhatikan potensi dan praktik

pertanian yang ada sehingga ada basis empirik yang cukup untuk mewujudkan suatu program. Karena umumnya persoalan pertanian kota terkait dengan lahan, maka kebijakan untuk memberi insentif kepada pemilik tanah yang merelakan propertinya dipakai sebagai lahan pertanian harus dipikirkan.

Merujuk pada ide Drescher (2001) untuk melibatkan aspek pertanian kota dalam perencanaan pengembangan kota, saya berpendapat bahwa pertanian kota harus menjadi sebuah gerakan sosial. Inisiatif bisa diambil oleh para perencana dengan antara lain mengidentifikasi dan menetapkan zonasi tertentu untuk pertanian. Patut diperhatikan bahwa bertani di pusat kota, dengan intensitas polusi (udara, tanah, dan air) yang tinggi amat tidak memungkinkan bertani untuk konsumsi makanan, barangkali hanya cocok untuk tanaman hias. Ke arah pinggir kota, upaya pemanfaatan pekarangan untuk kebun bisa dijadi. Alternatif lain, apabila pasar tersedia dalam jarak dekat, bisa dikembangkan kebun sayur dengan komoditas yang berumur pendek sehingga memungkinkan panen dalam waktu cepat.

Kepustakaan

- Anenias, Laarni C., 2001. *'The gulayan at bulaklakan project: creating greener pastures for urban dwellers'*. *BAR Digest*, April-June 2001 Volume 3 No. 2
- Burleigh, J. R., 2003. *Manila peri-urban vegetable project. AVRDC Progress Report 2002*, 128-141. Shanhua, Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Center. (32)
- Dela Cruz, Rita T., 2006. *'Gulayan Para sa Masa: A backyard vegetable-growing opportunities for poor Filipinos'*. *BAR Digest*, October-December 2006 Volume 8 Issue No. 4
- Drechsel, P., C. Quansah & F. Penning de Vries, 1999. *Stimulation of urban and peri urban agriculture in West Africa - Characteristics, challenges, and need for action. In: O.B. Smith (ed.) Urban agriculture in West Africa*. IDRC/CTA, Ottawa, Wageningen, page 19-40.
- Drescher, Axel, 2001. *'The integration of Urban Agriculture into urban planning. An analysis of the current status and constraints'*. Dalam *Annotated Bibliography on Urban Agriculture*. Wageningen: CTA.
- Duran, L. S., Jr., J. H. Batac, and P. Drechsel, 2001. *'Planning in a changing environment. The case of Marilao in the Philippines'*, In *Urban Agriculture Magazine* 4: 40-42. (7, 26)
- FAO, 2005. *Feeding Asian Cities*. Proceedings of the regional seminar. "Food into Cities" Collection AC/37-01E
- de Guzman, Constancio C., 2005. *Farming In The City An Annotated Bibliography Of Urban And Peri-Urban Agriculture In The Philippines With Emphasis On Metro Manila*. Annotated Bibliography Series. Lima, Peru: Urban Harvest
- McGee, T.G., 1991. *Introduction, In The Extended metropolis : settlement transition in Asia*. (Norton Ginsburg, Bruce Koppel, T.G. McGee, eds.) Honolulu: University of Hawaii Press , c1991.
- Memon, PA & D. Lee-Smith, 1993, *'Urban Agriculture in Kenya'*, dalam *Canadian Journal of African Studies/Revue Canadienne des Études Africaines*, Vol. 27, No. 1, hlm. 25-42.
- Mougeot, Luc J. A., 2005. *Agropolis. The Social, Political and Environmental Dimensions of Urban Agriculture*. London: Sterling, VA
- Nitural, Pedrito S., 2006. *Urban Agriculture Program In The Philippines: Its Beginning And Status*. Paper presented at the FFTC-PCARRD International Workshop on Urban/ Peri -Urban Agriculture in the Asian and Pacific Region. Tagaytay City, Philippines, May 22-26, 2006
- Purnomohadi, N., 2000. *'Jakarta: Urban agriculture as an alternative strategy to face the economic crisis'*, dalam *Growing Cities, Growing Food:*

- Urban Agriculture on the Policy Agenda. A Reader on Urban Agriculture* (N.Bakker, M.Dubbeling, S.Gundel, U.Sabel-Koschella & H de Zeeuw, eds.) German Foundation for International Development (DSE), Feldafing, Germany, hlm.:453–466
- Purwanto, S. A., 2009. '*Urban agriculture in developing country. The experience of the Philippines' urban agriculture programs*'. Makalah pada Regional Workshop API Fellowship Program, Osaka, Jepang 23-28 November 2009
- Purwanto, S. A. 2010. '*Bertani di Kota, Berumah di Desa: Studi Kasus Pertanian Kota di Jakarta Timur*'. Disertasi Program Studi Antropologi, Program Pascasarjana UI.
- Siregar, Masjidin, 2001. '*Petani Pinggiran Kota: Suatu Alternatif atau Masalah Baru*'. *Bulletin Agro Ekonomi* I (4) 2001 hlm.: 8-11
- Suryana, Asep, 2006. *Menjadi Pinggiran Jakarta: Dinamika Sosial Petani Buah di Wilayah Pasar Minggu 1921-1966*. Laporan penelitian "Indonesia Across Orders: The Reorganization of Indonesian Society 1930-1960. Jakarta: LIPI & NIOD.
- Twyman, C. & R. Slater, 2005. '*Hidden livelihoods? Natural resource-dependent livelihood development policy*', dalam *Progress in Development Studies* 5, 1 hlm. 1–15